



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2020

DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BOALEMO



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran tanpa menutup kemungkinan di suatu saat akan berkembang ataupun berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Boalemo khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan dasar di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, masih terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi namun berkat ketekunan semua ASN akhirnya semua kendala dapat diatasi dan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu segala saran dan masukan akan sangat dibutuhkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan dokumen Rencana Kerja.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo ini, diharapkan apa yang dituangkan di dalamnya dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2020.

Tilamuta, Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja Induk	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	8
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).....	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	12
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	13
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	13
3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.....	16
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	20
3.4. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	21
3.5. Program dan Kegiatan	21
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	23
BAB V : PENUTUP	24
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Organisasi Perangkat Dearah (OPD) sangatlah menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2020 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020 yang merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga pada Renstra Tahun 2017-2022 yang masuk dalam perodesasi RPJPD Tahun 2011-2025.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 seharusnya memiliki keterpaduan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Olehnya dalam penyusunan dokumen ini selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017-2022. Selain itu, sebagai dokumen perencanaan sektoral daerah di Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 juga berpedoman pada dokumen RPJMD, sedangkan dalam hal pemanfaatan

struktur ruang, penyusunan Renja memperhatikan dan mempedomani arahan spasial dalam RTRW Provinsi Gorontalo.

Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun lalu berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didasarkan pada penelaahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, menyusun Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2020.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Perda Peraturan Bupati Boalemo Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan.
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Boalemo Tahun 2017 – 2022.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2031.
20. Peraturan Daerah kabupaten Boalemo nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 – 2025.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman OPD dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang handal yang akan dilaksanakan Tahun 2020.
- b. Sebagai pedoman Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam penyusunan RKA – OPD Tahun 2020
- c. Sebagai tolok ukur OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam evaluasi penilaian kinerja dalam melaksanakan program pembangunan pada Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I Merupakan *Bab Pendahuluan* yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENJA seperti Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Merupakan *Bab Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu* yang memuat Evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III Merupakan *Bab Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah* yang akan memuat Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV Merupakan *Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah* yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial

dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dalam kurun waktu 2020

BAB V Merupakan *Bab Penutup*, yang memuat Catatan Penting, Kaidah-aidah Pelaksanaan, serta Rencana Tindak Lanjut.

LAMPIRAN Tabel-tabel yaitu Tabel T-C.29, Tabel T-C.30, Tabel T-C.31, Tabel T-C.32 dan Tabel T-C.33

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dan Capaian Renstra sebagai berikut :

1. Untuk program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial Masyarakat pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial sesuai target 4 Kali, terealisasi 2 Kali.
 - Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar yang dilatih pada Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat sesuai target 154 Orang, terealisasi 77 Orang.
2. Untuk program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :
 - Penyaluran bantuan bahan pangan kepada Masyarakat Miskin pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terealisasi sesuai dengan Target untuk 13.028 KK.
 - Pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan sesuai target 2 Kali terealisasi 2 Kali.
 - Jumlah Dokumen Administrasi Kantor yang Dibuat, pada Kegiatan Penyediaan Jasa terealisasi sesuai target 7 Dokumen.
 - Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk Teknologi Tepat Guna, pada Kegiatan Identifikasi Pengembangan dan Perlombaan Teknologi Tepat Guna, sesuai target 3 Orang terealisasi 3 Orang.
 - Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes, pada Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa, sesuai target 82 Desa terealisasi 82 Desa.

- Jumlah Desa yang memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa pada Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa sesuai target 82 Desa, terealisasi 82 Desa.
 - Cakupan yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat, pada Kegiatan Peningkatan Kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, sesuai target 113.000 Jiwa, terealisasi 113.000 Jiwa.
 - Untuk Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019 terlaksana sesuai target 100 %, ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu membina sekaligus mensosialisasikan anak yang berhadapan dengan hukum dan memberikan pelayanan kepada warga binaan kemasyarakatan.
 - Untuk Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku – pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2019 mencapai target 100 %, kegiatan yang di laksanakan adalah melakukan rapat koordinasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
 - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan di 7 (Tujuh) kecamatan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, terealisasi sesuai dengan yang di targetkan 100%.
 - Kegiatan yang dilaksanakan pada Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan yaitu pemberdayaan kesejahteraan keluarga, capaian target kinerja 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan.
 - Kegiatan pelaksanaan perlombaan desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa di Tahun 2019, menghasilkan 7 (tujuh) desa terbaik yang mewakili 7 (tujuh) kecamatan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan terbaik, capaian target kinerja 100 % sesuai dengan target yang di tetapkan.
3. Untuk program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Pelayanan Pemberian Bantuan Makanan bagi Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial pada Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa sesuai dengan Target 4.000 Jiwa, terealisasi 6.139 Jiwa.

- Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya sesuai target 18 Orang, terealisasi 20 Orang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada warga KAT, Camat dan Kepala Desa dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan KAT.
- Penyaluran Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin dengan Target 35 Kelompok, terealisasi 51 Kelompok.

Pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2019 terdapat Program/Kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target, sesuai target dan yang melebihi target.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Dokumen Renstra OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo, maka untuk Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan Pemberdayaan terdapat Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator Kinerja Kegiatan dalam upaya mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Tahun 2019 dialokasikan dana dari APBD Kab Boalemo sebesar **Rp. 4.967.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.845.488.102,- (Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Rupiah)** atau **98 %** yang digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur dan kegiatan Pelayanan Publik, indikator kinerja yang akan diwujudkan sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2019). Adapun penjelasan mengenai indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Penjelasan Sasaran Dari Capaian Kinerja 2019

- Sasaran 1
Terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial

- Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapat Bantuan, ditargetkan 35 Kelompok, realisasi 51 Kelompok.
- Jumlah KK yang Mendapat Perlindungan Sosial Berupa Beras Sejahtera ditargetkan 13.028 Jiwa, realisasi 13.028 Jiwa.
- Cakupan yang mendapat Perlindungan Jaminan Sosial ditargetkan 113.000 Jiwa, realisasi 113.000 Jiwa.
- Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Penerima Bantuan ditargetkan 4.000 Jiwa, realisasi 6.139 Jiwa
- Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, ditargetkan 4 Kegiatan, realisasi 2 Kegiatan
- Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bimbingan, ditargetkan 150 Orang, realisasi 150 Orang
- Jumlah Pendamping KUBE dan KAT terlatih, ditargetkan 18 Orang, realisasi 20 Orang
- Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga ditargetkan 1 Lembaga, realisasi 1 Lembaga
- Jumlah Rapat Evaluasi yang dilaksanakan ditargetkan 2 kali, realisasi 2 kali.
- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditargetkan 2 Kegiatan, realisasi 2 Kegiatan
- Sasaran 2
Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik
 - Jumlah Dokumen Administrasi Kantor ditargetkan 7 Dokumen, realisasi 7 Dokumen
- Sasaran 3
Berkembangnya Ekonomi Desa
 - Jumlah Tenaga Teknis dan Masyarakat yang dilatih, ditargetkan 154 Orang realisasi 77 Orang.
 - Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang Terbentuk, ditargetkan 60 BUMDes, realisasi 82 BUMDes
 - Jumlah Inovator Terbaik Alat dan Produk TTG, ditargetkan 3 Inovator realisasi 3 Inovator
 - Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbangdes, ditargetkan 82 Desa realisasi 82 Desa

- Jumlah Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan, ditargetkan 82 Desa realisasi 82 Desa
- Jumlah Desa terbaik dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, ditargetkan 7 Desa, realisasi 7 Desa
- Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, ditargetkan 2 Kegiatan, realisasi 2 Kegiatan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat

Daerah

Analisis isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergi program antara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dengan Dinas Sosial Provinsi dan juga Dinas PMD Provinsi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial dan PMD dalam rangka pencapaian kinerja Pelayanan Masyarakat dan Desa dilaksanakan dalam bentuk koordinasi antara semua stakeholder, dimana kegiatan ini dilaksanakan berupa Rapat koordinasi maupun rembuk OPD dengan lintas terkait yang telah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya usulan program dan kegiatan yang dihasilkan merupakan hasil aspirasi dari bawah yang kemudian dimasukan menjadi bahan usulan tahun berjalan maupun tahun yang akan datang.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu :
 1. Jumlah sasaran menggunakan data yang estimasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan data riil, sehingga dalam penghitungan capaian data pencapaian kinerja masih dibawah target.
 2. Belum terurusnya rencana pencapaian target sesuai dengan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan anggaran yang ada
 3. Untuk Indikator yang belum tercapai yaitu Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapat Bantuan.
3. Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Boalemo yang telah diuraikan di atas, maka dampaknya terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah sesuai dengan misi pembangunan pada RPJMD 2017-2022 yaitu Mewujudkan Kabupaten Boalemo yang Sejahtera sesuai Misi Bupati Boalemo yang dijabarkan dalam RENSTRA OPD 2017-2022.

Tujuan jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pelayanan Publik, Berupa Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Sosial, lembaga desa dan lembaga Ekonomi desa dengan baik dan Menyeluruh di Kabupaten Boalemo
- b. Meningkatkan Kompetensi Pegawai yang Tersedia untuk Melaksanakan Tupoksi menuju Standar Pelayanan Prima.
- c. Mengoptimalkan Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Tersedia.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada :

- a. Terwujudnya Konsep Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan sebagai arah Pembangunan Daerah pada Lapisan Masyarakat bawah.
- b. Terwujudnya Pelayanan Publik secara Prima.
- c. Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
- d. Peningkatan sumber Daya Manusia dan Kesadaran Masyarakat diperdekaan dalam Kehidupan Sosial.

Tantangan-Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, antara lain :

a. Tantangan

Tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo yaitu:

- Rendahnya Kesadaran Masyarakat Penerima Bantuan dalam Mengembangkan Bantuan yang telah diberikan.
- Sulitnya mengakses data-data kesejahteraan sosial secara cepat dan akurat.
- Masih adanya iklim ego sektoral dalam pelaksanaan koordinasi dinas lintas sektor.
- Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki dalam upaya peningkatan pemberian pelayanan ketahanan pangan yaitu :

- Terbukanya peluang Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berkualitas sebagai salah satu ikon di Kabupaten Boalemo.
- Terbukanya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait meliputi;
- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Boalemo 2017 -2022, sehingga Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo juga merupakan Renja dalam tahapan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia baik Pengelola Program Sosial maupun Program Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Program dan Kegiatan yang bisa menunjang pengurangan angka kemiskinan.
3. Meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial
4. Meningkatkan Sumber Daya yang ada di Desa dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil penelaahan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2. Meningkatnya ketersediaan bahan makanan bagi para korban bencana alam dan bencana sosial
3. Stabilitasnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat bagi penerima bahan pangan non tunai
4. Terpenuhinya pelayanan perlindungan jaminan sosial kesehatan masyarakat
5. Meningkatnya pembentukan dan pendirian BUMDes di masing masing desa se Kabupaten Boalemo

6. Tercapainya penyelesaian dokumen, perencanaan, pertanggungjawaban dan program yang dilaksanakan di Tingkat Desa.

Dari penelaahan diatas dapat dilaksanakan dalam 6 (enam) Program dan 8 (delapan) kegiatan sesuai Program Renstra Tahun 2017-2022,

- I. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.
- II. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
- III. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- IV. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
 - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
- V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- VI. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
 - Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Sosial RI Tahun 2020-2024, yaitu: ***Kementerian Sosial yang andal Profesional dan Inovatif serta Berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden : "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Nilai dan Semangat Gotong Royong"***

dengan misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. misi nomor 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. misi nomor 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. misi nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
4. misi nomor 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6 dan 7.

Tujuan Strategis Kementerian Sosial

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya Visi Pembangunan Nasional.

Tujuan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2020-2024 untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, melalui indikator :
 - Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Indeks Partisipasi Sosial;
 - Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)
 - Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui indikator :
 - Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dapat mencapai Visi Pembangunan Indonesia adalah : **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"** dengan misi terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Selain Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyerdehanaan Regulasi
Menyederhakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua undang-undang Pemberdayaan UMKM
4. Penyerdehanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu kepada Misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah : ***"Terwujudnya Perdesaan yang Memiliki Keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 akan dapat dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
2. Meningkatkan penatalaksanaan ekonomi dan investasi perdesaan
3. Membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi
4. Menyeraskan kebijakan dan program pembangunan daerah tertinggal
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan
6. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;

6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;
7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul; dan
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya status pembangunan desa, melalui indikator :
 - Jumlah desa mandiri
 - Jumlah desa berkembang
 - Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 60 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
3. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan N/A Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
4. Menurunnya angka kemiskinan, melalui indikator :
 - Persentase penurunan angka kemiskinan
5. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes, melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes berkembang
 - Jumlah Bumdes maju
6. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), melalui indikator :
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang
 - Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju
7. Meningkatnya investasi produk unggulan perdesaan mendukung transformasi ekonomi, melalui indikator :
 - Persentase kenaikan investasi produk unggulan perdesaan
8. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja perdesaan, melalui indikator :

- Penyerapan tenaga kerja perdesaan
- 9. Terentaskannya daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan
- 10. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
- 11. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
- 12. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
- 13. Meningkatnya rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi, melalui indikator :
 - Nilai rata-rata indeks perkembangan 92 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
- 14. Meningkatnya kapasitas SDM perdesaan, melalui indikator :
 - Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
 - Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
- 15. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Perbaikan *governance*, penyederhanaan regulasi dan penguatan kelembagaan, melalui indikator :
 - Nilai Reformasi Birokrasi
- 16. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Kementerian, melalui indikator :
 - Nilai Laporan Pengelolaan Keuangan
- 17. Tersedianya dokumen kebijakan dan perencanaan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta inovasi, data dan informasi, melalui indikator :
 - Persentase dokumen pengembangan kebijakan, perencanaan data dan informasi yang diimplementasikan.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.

Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo adalah Sebagai berikut :

"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Melalui Pemberdayaan dan Usaha Bersama Pemerintah dan Masyarakat dalam Rangka Menuju Ketahanan Sosial Masyarakat yang Mandiri dan Inovatif"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan 4 (Empat) misi yaitu:

1. Mendorong dan Mendukung Perluasan Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat.
2. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Sumber Pelayanan Masyarakat.
3. Penguatan Kesetiakawanan Sosial, Kegotongroyongan dan Tanggungjawab/Kepedulian Sosial.
4. Mengembangkan Potensi dan Sumber-sumber Kesejahteraan Sosial serta Peningkatan Profesionalisasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dengan mengacu kepada pada Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka rumusan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo adalah Sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan 3 (Tiga) misi yaitu:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan Adil.
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Terciptanya Pemerintahan yang lebih baik dan lebih melayani.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Wilayah di Kabupaten Boalemo berdasarkan pada Peraturan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Melihat kondisi wilayah Kabupaten Boalemo, maka potensi pengembangan wilayah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Potensi Pengembangan Hutan Produksi;
- b. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian;
- c. Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan;
- d. Potensi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- e. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan;
- f. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan;

- g. Potensi Pengembangan Kawasan Industri;
- h. Potensi Pengembangan Kawasan Perdagangan;
- i. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- j. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- k. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan; dan
- l. Potensi Pengembangan Pertambangan.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022, tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang ketahanan pangan di Kabupaten Boalemo.

Adapun rumusan tujuan didalam Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kesejahteraan sosial masyarakat
- b. Mengembangkan perekonomian perdesaan
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

b. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan kegiatan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- 1. terselesainya permasalahan kesejahteraan sosial
- 2. Berkembangnya ekonomi desa
- 3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta pelayanan publik

3.5. Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD 2017-2022, dan rancangan awal RKPD 2020, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
5. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
 - Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.
 - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan dibahas lebih detail dalam bentuk tabel berupa Rencana Kerja dan Pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu Tahun 2020 sesuai target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2017-2022, disajikan pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo Tahun 2020 pada khususnya dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Gorontalo pada umumnya.

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo 2020 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Pemerintahan Kabupaten Boalemo secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian pada nusa dan bangsa.

Tilamuta, Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD
KABUPATEN BOALEMO



FATIMA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2020
Kabupaten Boalemo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2019	Tingkat Realisasi (%) 2019		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1														
1	6													
1	1	2	15											
1	1	2	15	4	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	13 Kel.	35 Kel.	51 Kel.	146	35 Kel.	99	2.83
1	1	2	16											
1	1	2	16	7	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	123,000 Jiwa	124,528 Jiwa	113,000 Jiwa	113,000 Jiwa	100	123,000 Jiwa	360,528	2.93
1	1	2	21											
1	1	2	21	5	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	50	4 Kali	10	2.50
1	2	2	1											
1	2	2	1	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100	7 Dok	21	3.00

1	2	2	1	18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	- Kali	20 Kali	-	-	20 Kali	20	1.00
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	2				Bidang P3A									
1	1	4	18		Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	70%	100%	65%	100%	153.85	70%	2.70	3.86
1	1	4	18	1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	2 Keg.	100	2 Keg.	6	3.00
2	7				Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa									
3	4	1	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	65 Desa	82 Desa	60 Desa	82 Desa	137	65 Desa	229	3.52
3	4	1	17	3	Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	3.00	3.00
3	4	1	17	6	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	82 Desa	82 Desa	82 Desa	-	-	82 Desa	164	2.00

Tilamuta, Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Boalemo

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	-	- -	35 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	13 Kel.	51 Kel.	35 Kel.	35 Kel.	
2	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	-	- -	107,000 Jiwa	113,000 Jiwa	123,000 Jiwa	133,000 Jiwa	124,528 Jiwa	113,000 Jiwa	123,000 Jiwa	133,000 Jiwa	
3	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	-	- -	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	2 Kali	4 Kali	4 Kali	
4	Jumlah Dokumen Adminstrasi Kantor	-	- -	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	
5	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		- -	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	- Kali	- Kali	20 Kali	20 Kali	
6	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	-	- -	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	
7	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	-	- -	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	-	- -	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	82 Desa	- Desa	82 Desa	82 Desa	

Tilamuta, Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



FATLINA BODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2020
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Desa se Kab. Boalemo	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100 %	1,331,604,000	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Desa se Kab. Boalemo	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	100 %	1,331,604,000	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan 1 Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	1,331,604,000	Kegiatan Pengadaan Sarana dan 1 Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Kabupaten Boalemo	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	35 Kel.	1,331,604,000	
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	35 %	100,000,000	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	35 %	100,000,000	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, 2 Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	123,000 Jiwa	100,000,000	Peningkatan Kualitas Pelayanan, 2 Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	123,000 Jiwa	100,000,000	
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7 Kec	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	60 %	200,670,000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	60 %	200,670,000	
	3 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7 Kec	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Keg.	200,670,000	3 Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7 Kec	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	4 Keg.	200,670,000	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial dan PMD	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	502,120,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial dan PMD	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	100 %	252,120,000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial dan PMD	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	252,120,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial dan PMD	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	7 Dok	252,120,000	
	5 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provinsi dan Pusat	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	250,000,000	5 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provinsi dan Pusat	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	250,000,000	
5	Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Kab. Boalemo	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	70 %	426,890,000	Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Kab. Boalemo	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	70 %	426,890,000	
	6 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	426,890,000	6 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kab. Boalemo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	2 Keg.	426,890,000	

6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	65 Desa	135,780,000	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDes dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	65 Desa	135,780,000	
7	Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	85,780,000	7 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Desa se Kab. Boalemo	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100 %	85,780,000	
8	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	82 Desa	50,000,000	8 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	82 Desa	50,000,000	

Tilamuta, Oktober 2020

KERALA DINAS SOSIAL DAN PMD



FATLINA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial				
2	Bidang Sosial				
3	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
4	Bidang Pemberdayaan				

Tilamuta, Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



FATUMA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
	Bidang Sosial								
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase KK yang Mendapat Perlindungan Sosial berupa Pemberian Bahan Pangan	Desa se Kab. Boalemo	100 %	755,000,000	DAU/DAK/ PAD		100 %	1,357,014,000
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan KUBE	Kabupaten Boalemo	35 Kel.	755,000,000	DAU/DAK/ PAD		35 Kel.	1,357,014,000
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah PMKS dan Kelompok Rentan yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Desa se Kab. Boalemo	35 %	4,419,880,650	DAU/DAK/ PAD		40 %	276,560,000
2	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Jiwa yang Mendapat Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat	Desa se Kab. Boalemo	123,000 Jiwa	81,750,000	DAU/DAK/ PAD		133,000 Jiwa	100,000,000
3	Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Desa se Kab. Boalemo	4,000 Jiwa	4,338,130,650	DAU/DAK/ PAD		4,000 Jiwa	176,560,000
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	Desa se Kab. Boalemo	60 %	108,000,000	DAU/DAK/ PAD		70 %	225,750,000
4	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Sosial	7 Kec	4 Keg.	108,000,000	DAU/DAK/ PAD		4 Keg.	225,750,000
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Tertata dengan Baik	Dinas Sosial dan PMD	100 %	1,019,579,333	DAU/DAK/ PAD		100 %	543,355,250
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Administrasi Kantor	Dinas Sosial dan PMD	7 Dok.	750,204,083	DAU/DAK/ PAD		7 Dok.	273,980,000
6	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Provinsi dan Pusat	20 Kali	269,375,250	DAU/DAK/ PAD		20 Kali	269,375,250

	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
	Bidang P3A								
5	Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Persentase Organisasi yang Beranggotakan Perempuan yang Meningkat	Kab. Boalemo	70 %	300,000,000	DAU/DAK/ PAD		75 %	452,210,000
	7 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Boalemo	2 Keg.	300,000,000	DAU/DAK/ PAD		2 Keg.	452,210,000
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas Pendirian BUMDEs dan Menyertakan Modal dari Dana Desa	Desa se Kab. Boalemo	65 Desa	188,674,750	DAU/DAK/ PAD		70 Desa	211,120,000
	8 Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang Memasukan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Desa se Kab. Boalemo	100 %	88,674,750	DAU/DAK/ PAD		100 %	111,120,000
	9 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Desa Lokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Desa se Kab. Boalemo	82 Desa	100,000,000	DAU/DAK/ PAD		82 Desa	100,000,000

Tilamuta, Oktober 2020

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PMD



FATIMA PODUNGGE, S.Pd, M.Si

NIP. 19691222 199801 2 001